

MAPPING AND CONSTRUCT BUMDES DI KABUPATEN SIMALUNGUN (NAGORI TOTAP MAJAWA, NAGORI MARUBUN JAYA, NAGORI PARBALOGAN)

Jehan Ridho Izharsyah¹, Abrar Adhani², Sigit Hardiyanto³, Faizal Hamzah Lubis⁴

¹Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia

^{2,3,4}Program Studi Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Indonesia
jeanridho@umsu.ac.id¹, Abraradhani@umsu.ac.id², Sigithardianto@umsu.ac.id³,
Faizalhamzah@umsu.ac.id⁴

ABSTRAK

Abstrak: Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) menjadi salah satu aktifitas pembangunan dan sosial yang pada saat ini sangat menjadi tolok ukur dalam menjadikan desa yang tangguh dan mandiri. Hal inilah menjadi upaya yang dilakukan oleh seluruh desa di Indonesia terutama di Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara. Tujuan kegiatan pengabdian ini pertama melakukan penguatan BUMDES melalui pemahaman terkait kebijakan pemerintah berupa regulasi; kedua, memetakan kawasan strategi dengan potensi wilayah yang akan dikembangkan dan membangun BUMDES dengan pendampingan desa mitra. Mitra yang terlibat dalam pengabdian ini yaitu nagori Totap Majawa, nagori Marubun Jaya dan Nagori Parbalogan. Metode pengabdian dengan sosialisasi serta *Focus Group Discussion* (FGD). Hasil pengabdian yang dicapai mitra pengabdian memahami regulasi serta kebijakan yang telah ditentukan kementerian melalui sosialisasi, kemudian mitra memiliki peta BUMDES tentang potensi lokal desa melalui FGD dan ditindaklanjuti melalui pendampingan mitra.

Kata Kunci: Manajemen BUMDES; Mapping dan konstruk; Pendampingan BUMDES

Abstract: *Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) are one of the development and social activities which are currently very benchmarks in making villages strong and independent. This is an effort made by all villages in Indonesia, especially in Simalungun Regency, North Sumatra Province. The purpose of this service activity is to first strengthen BUMDES through understanding related to government policies in the form of a second regulation, mapping strategic areas with potential areas to be developed and building BUMDES with partner village assistance. Partners involved in this service are Totap Majawa nagori, Marubun Jaya nagori and Parbalogan nagori. Service method with socialization and Focus Group Discussion (FGD). The results of the service achieved by the service partners understand the regulations and policies that have been determined by the ministry through socialization, then the partners have a BUMDES map about the local potential of the village through FGDs and follow up through partner assistance.*

Keywords: *BUMDES Management; Mapping dan Constructing; BUMDES Assistance.*



Article History:

Received: 23-06-2021

Revised : 05-07-2021

Accepted: 06-07-2021

Online : 01-08-2021



*This is an open access article under the
CC-BY-SA license*

A. LATAR BELAKANG

Rangkaian upaya untuk mendorong perekonomian masyarakat pedesaan melalui ekonomi kreatif pemerintah Republik Indonesia dalam membangun komitmen pengembangan potensi lokal berbasis ekonomi dengan menggerakkan program BUMDES. Hal tersebut dikuatkan dengan Permendesa Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pedoman bagi daerah dan desa inilah salah satu alasan yang dianggap masih belum terimplementasi dan teraktualisasi dilapangan dengan konfrehensif. Sehingga, masih banyak permasalahan khusus yang di alami sebagian besar desa di Indonesia dalam pemahaman regulasi. Misalnya masih banyak desa yang sampai saat ini masih belum memiliki BUMDES dikarenakan manajemen tata kelola yang belum siap. Kemudian banyak BUMDES yang terkesan “hidup segan mati tak mau”. Polemik yang terjadi berbicara kualitas dan kuantitas diantaranya : kualitas Sumber daya manusia dalam menjalankan tata kelola bumdes dan kuantitas sumber daya alam dan teknologi yang terkesan tidak mempunyai untuk dijadikan badan usaha milik desa.

Nagori Totap Majawa, Nagori Marubun Jaya serta Nagori Parbalogan merupan nagori/ desa yang terletak dikabupaten simalungun. Kabupaten Simalungun merupakan Kabupaten terluas ketiga di Propinsi Sumatera Utara setelah Kabupaten Madina dan Kabupaten Langkat. Ketiga nagori ini merupakan nagori atau desa yang berbatasan dengan beberapa kawasan PTPN IV perkebunan sawit serta kawasan pesawahan. Maka sebagian besar aktifitas masyarakat ketiga nagori ini adalah petani serta buruh atau karyawan perkebunan. Adapun beberapa permasalahan Mitra diantaranya : *Pertama*, dalam aspek sosial (Masyarakat sebahagian besar berharap dari potensi lokal seperti ikan air tawar, padi, sawit dan aspek sosial lainnya sangat bergantung terhadap kewilayahan. *Kedua*, aspek kebudayaan (Budaya dalam hal ini kebiasaan yang dibangun dalam kesukuan. *Ketiga*, Aspek religi (Masyarakat masih berharap akan potensi daerah sedangkan terkadang terjadi pasang surut. *Keempat*, Aspek Mutu Layanan (Mutu layanan administrasi dan layanan kesehatan, *Kelima* Kehidupan Masyarakat belum berfikiran produktif.

Hal yang mendasari hadirnya pengabdian ini diantaranya referensi pengabdian yang dilakukan oleh (Leny Pramesti, ummul mustaqim, musyawaroh, 2021) bahwa dari hasil identifikasi potensi dan permasalahan di lahan bumdes Desa Puntukrejo Kabupaten Karanganyar disimpulkan bahwa lahan bumdes berpotensi digunakan sebagai area rekreasi, tempat berkesenian, lahan pertanian, pengembangan UMKM setempat dan kegiatan kemasyarakatan lainnya sehingga penentuan potensi yang akan

menjadikan produk atau kegiatan unggulan menjadi pemasukan masyarakat setempat.

Kemudian pengabdian yang dilakukan oleh (Chindy Sasauw, Ronny Gosal, 2018) bahwa kemampuan dari masing-masing pengurus bumdes merupakan hal terpenting dalam menjalankan roda organisasi bumdes secara teratur serta manajemen bumdes diharapkan semakin baik untuk bumdes menjadi berinovasi.

Hal ini selaras dengan kebijakan pemerintah dalam Permendes PDTT No.4 tahun 2015, bab II pendirian BUM Desa pasal 4 bahwa Bumdes merupakan inisistif pemerintah desa dan /atau masyarakat desa, meningkatkan potensi usaha ekonomi desa, memanfaatkan sumber daya alam desa, meningkatkan dan membentuk sumber daya manusia yang mampu mengelola Bumdesa serta modal dan pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa.

Rangkaian penelitian, pengabdian serta rujukan referensi diatas merupakan bagian penguat dan dasar dalam rujukan pengabdian yang dilakukan kepada mitra sehingga diperoleh solusi yang ditawarkan kepada mitra diantaranya : 1). Melakukan pelatihan dan peningkatan tentang BUMDES melalui pemahaman regulasi dan kebijakan yang telah ditentukan pemerintah, dengan tujuan pengurus BUMDES nagori Totap Majawa, Nagori Marubun Jaya dan Nagori Parbalogan memahami aktualiasi terhadap keputusan yang telah ditetapkan pemerintah 2). Melakukan pemetaan (*Mapping*) potensi desa sebagai rencana BUMDES serta konstruk BUMDES sesuai dengan peluang pasar dengan tujuan agar mitra memfokuskan pengembangan sesuai dengan analisis pasar serta peluang yang dimiliki nagori tersebut. 3). Melakukan pendampingan sebagai bagian dari desa mitra dan desa binaan dalam integrasi perguruan tinggi dengan desa mitra dengan tujuan mendampingi dan membantu desa dalam meningkatkan tata kelola BUMDES.

B. METODE PELAKSANAAN

Dalam tahapan pelaksanaan program kemitraan masyarakat kepada mitra. Kegiatan pengabdian ini melibatkan tiga mitra diantaranya pengurus BUMDES Nagori Totap Majawa, Pengurus BUMDES Nagori Marubun Jaya serta Pengurus BUMDES Nagori Parbalogan. Dalam pelaksanaan kegiatan Pengabdian dilakukan dengan 3 tahapan diantaranya:

1. Tahap Awal

Melakukan pelatihan atau *Focus Group Discossion* (FGD) dan peningkatan tentang bumdes melalui pemahaman regulasi dan kebijakan yang telah ditentukan oleh kementrian.

2. Tahap Kedua

Melakukan praktik pemetaan (*Mapping*) potensi desa sebagai rencana bumdes serta konstruk bumdes sesuai dengan peluang

3. Tahap Ketiga

Melakukan pendampingan sebagai bagian dari desa mitra dan desa binaan dalam integrasi perguruan tinggi.

Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tahapan *pertama*, pra kegiatan dengan penjajakan kemitraan dan menjalin komunikasi kepada aparatur desa dengan memberikan informasi dengan adanya kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1. Rangkaian Kegiatan dan Penanggungjawab Kegiatan

No	Nama Kegiatan	Waktu	Penanggungjawab	Peserta	Lokasi
1	Kegiatan Survei Lokasi Kegiatan Pengabdian	Jum"at. 12 Maret 2021 (14.00- 15.30)	1. Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si, 2. Faizal Hamzah Lubis.,S.Sos.,M.I kom, 3. Abrar Adhani.,S.Sos., M.Ikom	Pengurus BUMDES Nagori Totap Majawa, Nagori Marubun Jaya dan Nagori Parbalogan	Balai Nagori Totap Majawa
2	Sosialisasi serta pemaparan tentang regulasi serta kebijakan BUMDES.	Sabtu 12 Juni 2021 (08.00- 10.00)	Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos.,M.Si, (Pemateri I)	Pengurus BUMDES Nagori Totap Majawa, Nagori Marubun Jaya dan Nagori Parbalogan beserta aparatur Nagori	Balai Nagori Totap Majawa
3	Sosialisasi serta pemaparan tentang peran media publikasi dalam pengembangan BUMDES secara online	Sabtu 12 Juni 2021 (10.00- 12.00)	Faizal Hamzah Lubis.,S.Sos.,M.Ik om, (Pemateri II).	Pengurus BUMDES Nagori Totap Majawa, Nagori Marubun Jaya dan Nagori Parbalogan beserta aparatur Nagori	Balai Nagori Totap Majawa

4	Focus Group Discossion (FGD) Mapping potensi kewilayahan yang berpotensi dijadikan BUMDES	Sabtu 12 Juni 2021 (13.30- 15.00)	1. Jehan Ridho	Pengurus	Balai
			Izharsyah, S.Sos.,M.Si,	BUMDES	Nagori
			2. Faizal Hamzah	Nagori	Totap
			Lubis.,S.Sos.,M. Ikom,	Majawa, Nagori	Majawa
3. Abrar	Marubun Jaya dan	Nagori			
Adhani.,S.Sos., M.Ikom	Parbalogan beserta aparatur Nagori				

Keterangan: Hasil Koordinasi Tim Dan Pengurus BUMDES

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Kegiatan

Nagori Totap Majawa, Nagori Marubun jaya serta nagori parbalogan merupakan nagori yang ada di Kecamatan Tanah Jawa Kabupaten Simalungun. Kondisi mitra merupakan desa yang memiliki teritorial yang cukup baik untuk dikembangkan, Misalnya Nagori Totap Majawa memiliki luas teritorial yang baik. Hampir setengah luas wilayahnya merupakan kawasan pesawahan yang dialiri oleh daerah aliran air atau irigasi yang sangat baik. Hampir seluruh penduduk memiliki pekerjaan sebagai petani, kemudian memiliki kerajinan ulos tradisional dan lain-lain. Kemudian Nagori marubun jaya memiliki wilayah yang sebahagian besar adalah daerah industri kecil seperti kilang, warung dan lain-lain. Kemudian parbalogan memiliki kawasan yang dikelilingi oleh PTPN 4 Marihat dan Bahjambi serta sebahagian besar seperti ada Galian C Dan lain-lain.

Kemudian pandangan dalam aspek budaya dan kebiasaan akan kependudukan bahwa desa mitra merupakan desa yang sebahagian besar memiliki marga atau boru batak simalungun itu sendiri seperti Sinaga, Saragih, Damanik dan Purba selebihnya suku Jawa dalam aspek kepercayaan di lokasi mitra memiliki rasio 50 % beragama islam, 40 % Nasrani dan 10 % campuran katolik dan lain-lain. Kemudian aspek kesehatan dan mutu layanan masing-masing desa mitra memiliki kantor desa sebagai pusat administrasi dan memiliki PUSTU (Puskesmas Pembantu). Kehidupan masyarakat dapat dikatakan hampir sebahagian besar merupakan petani, pegawai, buruh dan lain-lain. Dalam aktifitas pengabdian dan program kemitraan diatas melibatkan pengurus BUMDES ketiga nagori diatas serta aparatur desa yang terlibat berjumlah 15 orang. Langkah-langkah kegiatan dalam pengabdian diantaranya:

- a. Melakukan pelatihan atau *Focus Group Discossion* (FGD) dan peningkatan tentang BUMDES. Kegiatan ini berlangsung seperti pada Gambar 1 berikut.



Gambar 1. Penyampaian Materi oleh Para Pemateri

- b. Melakukan praktik pemetaan (*Mapping*) potensi desa sebagai rencana BUMDES. Kegiatan ini seperti pada Gambar 2 berikut.



Gambar 2. Kegiatan *Mapping*

- c. Melakukan pendampingan sebagai bagian dari desa mitra dan desa binaan dalam integrasi perguruan tinggi

Pendampingan pertama yang dilakukan oleh tim kepada mitra terlebih dahulu memberikan edukasi kepada pengurus BUMDES tentang regulasi yang ada pada saat ini, Pada kegiatan ini target dan capaian yang diharapkan adalah seluruh pengurus BUMDES Nagori memahami kebijakan serta regulasi yang diberikan pemerintah. Pada saat pendampingan pengurus BUMDES diberikan informasi terhadap aplikasi BUMDES yang ada serta pendaftaran BUMDES yang diakui oleh pemerintah melalui nomor registrasi BUMDES.

Kedua, pendampingan yang selanjutnya seluruh Pengurus BUMDES diberikan Pemahaman tentang pentingnya media sosial dan online dalam mengembangkan BUMDES. Karena dengan media sosial yang dibangun masyarakat mendapatkan informasi berupa pemasaran produk, potensi lokal. Pada pendampingan ini pengurus BUMDES diberikan pemahaman dan didampingi dalam membuat media online berupa Facebook, Website dan Media Publikasi Whatsup dan lain-lain.

Ketiga, pendampingan yang dilakukan dengan pelatihan dan FGD *Mapping* Wilayah Nagori dengan pendekatan potensi wilayah. Pada pelatihan ini masing-masing pengurus BUMDES diberikan waktu dan kesempatan untuk menganalisis potensi wilayah Nagori mereka. Maka diperoleh mapping sebagai berikut:

1) Nagori Totap Majawa

Potensi wilayah dan komoditas Sawah dan petani ikan maka rencana kegiatan yang diprioritaskan untuk dibangun berupa Wisata Sawah dan Agrowisata edukasi perikanan. UMKM lainnya berupa ULOS tradisional, Hewan terpadu dan Pabrik kerupuk home industry.

2) Nagori Marubun Jaya

Hasil Mapping yang dilakukan dengan melihat territorial kewilayahan diperoleh informasi Nagori Marubun Jaya ingin mengembangkan Industri pabrik, Ternak Hewan dan pengisian air minum. Hal ini dilihat dari potensi konsumsi yang cukup besar dilakukan masyarakat.

3) Nagori Parbalogan

Nagori parbalogan memiliki territorial yang tidak cukup luas, berdasarkan analisis yang dilakukan oleh tim dan pengurus BUMDES, Nagori Parbalogan memiliki peluang untuk mengembangkan ternak hewan lembu terpadu dan perusahaan Air minum. Aktifitas pendampingan ini dapat terlihat pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Pendampingan Kepada Desa Mitra serta aktivitas perencanaan

No	Nama Desa/ Nagori	Aktifitas dan Rencana Bumdes	Pendampingan
1	Totap Majawa	1. Sawah dan petani ikan (Rencana kegiatan bumdes wisata sawah dan agrowisata edukasi perikanan) 2. Pekerja ulos (ulos khas dijadikan UMKM) 3. Hewan Ternak terpadu 4. Pabrik kerupuk ikan rumahan (komoditas desa)	Proses mapping dan koordinasi dengan pemerintah desa
2	Marubun Jaya	1. Industri pabrik 2. Ternak hewan 3. Pengisian air minum dll	Koordinasi dan memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDES
3	Parbalogan	1. Rencana Ternak Lembu 2. Rencana perusahaan air minum	Koordinasi dan memberikan pemahaman kepada pengurus BUMDES

Keterangan: Hasil koordinasi tim dan pengurus Bumdes

2. Monitoring dan Evaluasi

Dari hasil monitoring pra kegiatan dan aktifitas yang dilakukan di lokasi mitra dapat diperoleh keterangan dalam Tabel 3 berikut.

Tabel 3. Prioritas dan strategi Kebijakan dalam Perencanaan

Prioritas	Strategi dan Kebijakan	Nilai Bobot
	<i>Strength - Opportunity (SO)</i>	$1,73 + 1,31 = 3,04$
I	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan pemahaman Kebijakan tentang regulasi Bumdes kepada pengurus (SDM) 2. Pemanfaatan program kementerian dalam membangun desa mandiri berbasis komoditas lokal dan teritorial terpadu.. 3. Penguatan pendapatan desa dengan badan usaha dan ekonomi desa. 	
	<i>Strength - Threats (ST)</i>	$1,73 + 1,20 = 2,93$
II	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pemantauan terhadap potensi utama desa 2. Penguatan pendapatan masyarakat melalui aktifitas ekonomi berbasis kreatifitas desa 	
	<i>Weakness - Opportunity (WO)</i>	$1,40 + 1,31 = 2,71$
III	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kerjasama desa atau nagori yang memiliki bumdes 2. Menetapkan kebijakan bumdes desa berdasarkan hasil pemanfaatan potensi lokal. 3. Peningkatan dengan dukungan para stakeholder dalam mengelola bumdes. 	
	<i>Weakness - Threats (WT)</i>	$1,40 + 1,20 = 2,60$
IV	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan serta pembinaan terhadap kualitas bumdes 2. Peningkatan pengawasan pemerintah desa dengan penguatan regulasi 3. Peningkatan bumdes dengan perencanaan pembangunan desa yang berkelanjutan. 	

Sumber : Data Primer diolah, 2021

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas maka diperoleh keterangan sebagai berikut :

1) Nagori Totap Majawa

Nagori Totap Majawa sudah memiliki Bumdes akan tetapi penguatan terhadap tata kelola manajemen bumdes perlu dilakukan penguatan. Terutama penguatan atas regulasi kebijakan seperti panduan registrasi aplikasi bumdes, pendaftaran di sidesa.id. Nagori Totap Majawa Peluang pengembangan lebih besar dari dua nagori lainnya. Dengan peluang bumdes agrowisata sawah. Berada pada Prioritas I

2) Nagori Marubun Jaya

Nagori Marubun Jaya sudah pernah melakukan pendaftaran di sidesa.id tapi tindak lanjut yang belum dikembangkan. Perencanaan bumdes nagori marubun jaya memiliki tantangan tersendiri berdasarkan teritorial karena sebahagian wilayah teritorial berada berbatasan dengan lahan PTPN. Maka perencanaan awal pengembangan Bumdes berbasis industri dan ternak. Berada pada prioritas II.

3) Nagori Parbalogan

Berbeda dengan kedua nagori sebelumnya. Nagori Parbalogan berada di areal PTPN. Di aliri oleh sungai yang cukup besar. Penguatan yang dilakukan dengan bumdes yang belum terbentuk signifikan. Perencanaan pebangunan usaha air minum, galian c dan lain-lain. Maka berada dalam prioritas III.

3. Kendala yang Dihadapi atau Masalah Lain yang Terekam

Kendala yang dihadapi mitra dalam melakukan pengembangan bumdes diantaranya *Pertama*, aspek pemodalan sebagaimana masih banyak masyarakat yang memiliki kekurangan dalam pemodalan dan kualitas sumberdaya dalam mengelola di nagori Totap Majawa, Marubun Jaya dan Parbalogan. Sama halnya Berdasarkan pengabdian yang dilakukan (Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, 2016) kendala dan permasalahan yang dihadapi di Bumdes Kabupaten Jepara diantaranya aspek permodalan, aspek sumberdaya dan tata kelola kelembagaan bumdes.

Kedua, Bumdes di tiga nagori belum sepenuhnya melibatkan masyarakat dalam pembangunan sehingga perlu peningkatannya sama halnya juga dengan pengabdian yang dilakukan (Hasan Sidik, 2020) bumdes Desa Langensari menerapkan model *Collaborative Governance* atau tata kelolakolaboratif yang melibatkan semua pihak

Ketiga, Kendala yang dihadapi mitra diantaranya peran serta lembaga desa dan organisasi perangkat desa dengan memaksimalkan unit-unit usaha dalam membangun Bumdes masih rendah. Hal ini dapat dilihat juga dari pengabdian yang dilakukan Hillalliatun F, Rika N, i Made i, (2018) bahwa Unit –unit dalam bumdes di desa Abiantuwung telah terlaksana dan perlunya peningkatan terhadap unit-unit.

Keempat, mitra belum sepenuhnya melakukan kontribusi keberadaan badan usaha milik desa dalam penguatan ekonomi desa. Hal ini juga sama dengan pengabdian yang dilakukan (Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, n.d.2018) Bahwa bumdes sebagai penguat ekonomi desa landungsari Kabupaten Malang membutuhkan kontribusi sumber dana serta keberadaan bumdes.

Kelima, Mitra belum memiliki strategi pendekatan dalam pengembangan potensi desa hal ini selaras dengan pengabdian yang dilakukan (Rizki Febri Eka Pradani, 2020) bahwa Bumdes perlu menggunakan OVOP (*One Village One Product*) dalam melakukan pendekatan strategi pengembangan Bumdes.

Keenam mitra masih kesulitan dalam mengaktualisasikan prinsip *Good Governance* hal ini sesuai dengan (Trivena Y.P, Welly W, 2020) bahwa bumdes diharapkan memiliki nilai-nilai kooperatif, partisipasi, transparansi serta akuntabilitas.

Ketujuh, mitra belum menggunakan teknologi publikasi dalam upaya pengembangan Bumdes hal ini juga selaras dengan (Irfan Nursetiawan, 2018) bahwa penerapan teknologi informasi merupakan salah satu hal terpenting dalam pengembangan usaha yang dilakukan oleh Bumdes.

D. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan aktifitas yang telah direncanakan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam pengabdian tahap pertama Melakukan pelatihan dan peningkatan tentang BUMDES melalui pemahaman regulasi dan kebijakan yang telah ditentukan pemerintah. Pada kegiatan ini telah terlaksana melalui sosialisasi dan FGD Sehingga awalnya beberapa pengurus Bumdes tidak memahami *updating* informasi atas kebijakan setelah dilakukannya kegiatan ini mereka para pengurus Bumdes memperoleh pemahaman yang baik, kemudian tahap kedua Melakukan pemetaan (*Mapping*) potensi desa sebagai rencana bumdes serta konstruk bumdes sesuai dengan peluang pasar. Pada kegiatan ini telah terlaksana dengan melakukan praktik dan pelatihan analisis potensi dengan skala prioritas. Ketiga nagori tersebut telah merancang beberapa aktifitas bumdes kedepannya serta, tahap selanjutnya melakukan pendampingan sebagai bagian dari desa mitra dan desa binaan dalam integrasi perguruan tinggi dan desa mitra dalam tahap ini telah dilakukan *follow up* ataupun tindak lanjut sesuai dengan keinginan para pengurus bumdes untuk mengemperoleh pendampingan terutama aktualisasi serta penguatan sumberdaya yang ada.

Saran yang ingin diberikan dalam pengabdian ini diantaranya penguatan sumberdaya baik potensi manusia, tata kelola, manajemen kelembagaan serta potensi local berbasis pengembangan. Kemudian peningkatan pemodaln bumdes dengan menjalin kerjasama baik dengan pemerintah, swasta serta mitra yang dapat membangun bumdes. Serta meningkatkan partisipasi pembangunan melalui keikutsertaan masyarakat sehingga bumdes menjadi milik bersma.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kepada: (1) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, (2). Lembaga Penelitian Dan Pengabdian (LPPM), (3). Mitra Pemerintah Nagori Totap Majawa beserta kepengurusan Bumdes Totap Sejahtera, (4). Mitra Pemerintah Nagori Marubun Jaya dan kepengurusan Bumdes Marubun Jaya serta (5). Mitra Pemerintah Nagori Parbalogan dan kepengurusan Bumdes Parbalogan.

DAFTAR RUJUKAN

Chindy Sasauw, Ronny Gosal, W. W. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (bumdes) Dalam meningkatkan Masyarakat di desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe. *Jurnal Jurusan Ilmu*

- Pemrintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratulangi*, 1(1), 1–10.
- Coristya Berlian Ramadana, Heru Ribawanto, S. (n.d.). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Penguatan Ekonomi Desa (Studi di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, 1(6), 1068–1076.
- Edy Yusuf Agunggunanto, Fitri Arianti, Edi Wibowo Kushartono, D. (2016). Pengembangan Desa Mandiri Melalui Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 13(1), 67–81.
- Ferdianto, Benny (2016). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Tiyuh Candra Kencana Kecamatan Tulang Bawang Tengah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Lampung, *Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lampung*
- Fajar Sidik (2015). Menggali Potensi Lokal Mewujudkan Kemandirian Desa. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115–131.
- Gunawan, K. (2011). Manajemen BUMDes Dalam Rangka Menekan Laju Urbanisasi. *Widyatech Jurnal Sains dan Teknologi*, 10 (3), 61-72. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 19(2), 115–131.
- Hasan Sidik. (2020). Meningkatkan Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sebagai Penggerak Ekonomi Pedesaan Di Desa Langensari. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 21–30.
- Hillalliatun F, Rika N, i Made i, dkk. (2018). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Sebagai penguatan Ekonomi Desa Abiantuwung. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 8(1), 95–103.
- Irfan Nursetiawan. (2018). Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi BUMDES. *Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 04(02), 72–81.
- Leny Pramesti, ummul mustaqim, musyawaroh, avi marlina. (2021). Identifikasi Potensi Dan Permasalahan Di Lahan BUMDES Desa Puntukrejo Kabupaten Karanganyar. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Arsitektur (SENTHONG)*, 4(1), 466–475. Retrieved from <https://jurnal.ft.uns.ac.id/index.php/senthong/article/view/1333/663>
- Ridlwan, Z (2014). Urgensi Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam Pembangunan Perekonomian Desa. *Fiat Justisia Jurnal ilmu Hukum* 8(3), 424–440
- Rizki Febri Eka Pradani. (2020). Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan (JESK)*, 01(01), 15–23.
- Sayuti M.(2011). Pelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDs) Sebagai Penggerak Potensi Ekonomi Desa Dalam Upaya Pengetasan Kemiskinan di Kabupaten Donggala, *Jurnal Academica Fisip Untad* 03(2), 717–728.
- Soemantri, Bambang (2011). Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Bandung : Fokus Media.
- Sukamanto,(2014). Rancang Bangun Bisnis dan Pengelolaan BUM Desa. Yogyakarta: Forum Pengembang Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD).
- Trivena Y.P, Welly W, A. K. (2020). Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). *Jurnal Politico*, 9(03), 1–10.